

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT

**I Made Putra Yasa<sup>1</sup>**  
**Made Sinthya Aryasthini Mahaendrayasa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana  
Email: [putrayasa@unud.ac.id](mailto:putrayasa@unud.ac.id)

**ABSTRAK**

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian dan isu perekonomian yang selalu menjadi perhatian penting bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga, ekspor dan impor terhadap inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder provinsi-provinsi di Indonesia Bagian barat yang berjumlah 18 provinsi dari tahun 2011-2021. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Impor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

**Kata Kunci:** *pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga, ekspor impor, inflasi*

**ABSTRACT**

*Inflation is an indicator of economic stability and an economic issue that has always been an important concern for developing countries, especially Indonesia. This study aims to analyze the effect of government spending, interest rates, exports and imports on inflation in the western part of Indonesia. This study uses secondary data from provinces in western Indonesia, totaling 18 provinces from 2011-2021. The quantitative analysis method used in this study is the panel data regression method. government consumption spending has a negative and significant effect on the inflation rate in the western part of Indonesia. Interest rates have a positive and significant effect on the inflation rate in the Western Region of Indonesia. Exports have a positive and insignificant effect on the inflation rate in the Western Region of Indonesia. Imports have a negative and insignificant effect on the inflation rate in the Western Region of Indonesia.*

**Keywords:** *government spending, interest rate, export import, inflation*

## PENDAHULUAN

Adanya wabah pandemi covid-19 membawa tantangan bagi segala lini sektor kehidupan, tidak hanya aja dibidang kesehatan, namun juga dibidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Pandemi ini telah membawa pola baru dan sebagai tantangan besar bagi suatu negara untuk dapat bertahan dan tetap mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin negara tersebut tersebut dapat stabil dari sisi ekonomi dan juga ketahanan wilayah. Pandemi ini dianggap telah melemahkan kondisi ekonomi wilayah melalui berbagai aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam penerapan PPKM (pembatasan kegiatan masyarakat) adapun dampak yang ditimbulkan seperti penurunan angka kesempatan kerja yang berdampak pada pengangguran, peningkatan angkatan kemiskinan, terdapat beberapa sub sektor usaha yang tutup, serta angka pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan bahkan mencapai angka yang negatif.

Dampak lain yang ditimbulkan setelah adanya pandemi ini yaitu adanya gejala ancaman resesi global juga turut menghantui berbagai negara agar dapat menyiapkan tameng dalam menjaga pertumbuhan ekonominya agar terus dapat tumbuh dan stabil diangka yang positif. Beberapa faktor munculnya pemicu adanya resesi global yaitu : 1) Inflasi global yang melonjak akibat *supply disruption* karena pandemi dan perang dikombinasi dengan *excessive stimulus fiscal* dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju. 2) Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, *capital outflow*, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya hutang (*cost of fund*). 3) Potensi krisis utang global yang disebabkan banyak negara memiliki resiko utang tinggi diatas 60%-100% PDB. Biaya utang dan *revolving (refinancing) risk* naik tajam dan potensi default >60 negara melonjak. 4) Potensi adanya stagflasi yaitu pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi.

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhan inflasi ini diharapkan selalu stabil agar tidak menimbulkan kejolak makro ekonomi yang nantinya dapat memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap perekonomian (Salim dkk.,2021).

Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka bank sentral dapat mengeluarkan suatu bentuk kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar perekonomian dapat terangsang dan tumbuh kearah yang positif dari tingginya jumlah kredit yang disalurkan untuk produktivitas perekonomian masyarakat. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang ada di tiap wilayah.

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian dan isu perekonomian yang selalu menjadi perhatian penting bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Ditengah gejolak resesi global menjaga angka inflasi untuk dapat tetap stabil sangatlah menting dalam menjaga tingkat harga dan kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan suatu bentuk kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Jika tingkat inflasi rendah dan stabil akan menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi. Setiap kali ada gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri masyarakat selalu mengaitkan dengan masalah inflasi (Mankiw, 2006). Menurut (Boediono, 2014:161), inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami peningkatan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi merupakan naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013:147).

Menurut data dapat diketahui bahwa tingkat inflasi dalam rentang waktu 10 tahun di Indonesia tingkat inflasi mulai mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga puncaknya ditahun 2014 diangka 8 persen hal ini disebabkan karena harga-harga komoditi yang mengalami fluktuasi serta diiringinnya dengan shock dalam kebijakan peningkatan harga BBM, sehingga hal tersebut yang secara otomatis dapat menyebabkan peningkatan harga komoditi lainnya, dapat disadari bahwa BBM merupakan faktor utama dalam pelaksanaan angkutan yang menjadi moda

transportasi dalam pendistribusian produk ke seluruh wilayah baik melalui udara, darat dan laut, sehingga peningkatan BBM tersebut akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan biaya transportasi dan pada akhirnya terjadi peningkatan beberapa harga produk di wilayah Indonesia. Ditahun 2015 hingga 2018 angka inflasi masih tetap terjaga diangka batas normal 3 persen, namun inflasi tersebut mulai mengalami tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2021 hal tersebut dikarenakan indikasi efek dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat serta melemahnya kondisi perekonomian masyarakat disaat itu.

**Gambar 1 Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2011-2021**



Sumber: BPS Indonesia, 2022

Apabila dicermati bahwa tingkat inflasi diwilayah Indonesia bagian barat ditahun 2021 rata-rata wilayah mengalami fluktuasi diangka 2 persen, terdapat beberapa wilayah yang tergolong memiliki inflasi rendah ditahun 2021 yaitu wilayah Sumatra utara sebesar 0.46 persen dan jawa timur sebesar 0.69 persen, serta terdapat 2 wilayah yang memiliki angka inflasi stabil yaitu kep. Bangka Belitung sebesar 3.60 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 3.32 persen. Melemahnya tingkat inflasi diwilayah Indonesia dibagian barat ini memang cenderung disebabkan karena dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi, namun stabilnya tingkat inflasi di dua wilayah bagian barat ini didorong oleh stabilnya indeks harga kelompok pada sektor transportasi, perumahan, listrik dan bahan bakar serta kelompok makanan dan minum

yang menyebabkan angka pertumbuhan yang terjaga diangka positif, sebagai wilayah pusat aglomerasi di Indonesia wilayah bagian barat ini sangat perlulah menyiasati strategi untuk dapat menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi agar tidak terjadi dampak sosial yang ditimbulkan seperti penutupan usaha dan PHK karyawan secara besar-besaran.

**Gambar 2. Inflasi Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2021**



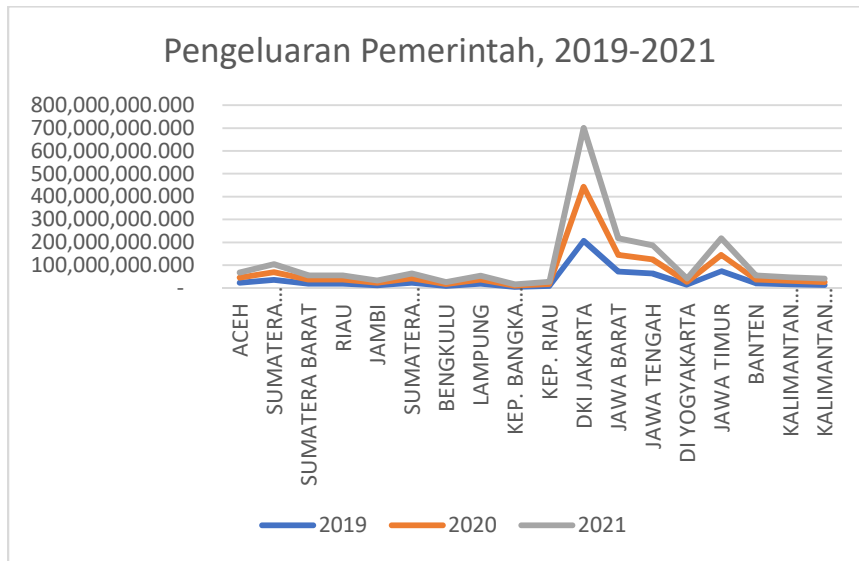
Sumber : BPS Indonesia, 2022

Indikasi kenaikan tingkat inflasi ditahun ini dan ancaman resesi global salah satu pemicunya adalah akibat gejolak kondisi ekonomi dunia yang kurang stabil akibat dampak perang antara rusia dan ukraina yang sangat membawa pengaruh besar bagi jalannya perekonomian dunia, selain itu beberapa negara didunia juga sedang mempersiapkan diri ditengah ancaman resesi yang akan mempengaruhi instabilitas perekonomian suatu negara.

Pengeluaran pemerintah atau yang sering disebut *government expenditure* yaitu suatu bentuk tindakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). Pengeluaran pemerintah adalah besaran dana yang dikeluarkan dari kas pemerintah atau kas

negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Djaenuri, 2016). Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat dan negaranya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mewakili negara untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan atas warga dan masyarakatnya (Noor, 2015).

**Gambar 3. Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2021**



Sumber : BPS Indonesia, 2022

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah setiap tahunnya cenderung mengalami tren peningkatan dalam waktu tiga tahun terakhir, pengeluaran ini menyesuaikan dengan besaran wilayah dan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut, dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi dominan ada di wilayah DKI Jakarta, hal tersebut dikarenakan wilayah ini hampir menguasai 56 persen jumlah penduduk yang ada di wilayah Indonesia, memusatnya di wilayah ini akan berdampak pada besaran pengeluaran pemerintah yang akan dikeluarkan untuk membiayai dari sisi fasilitas publik dan pemenuhan kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadinya inflasi apabila kurang adanya kontrol dari sisi rutinitas pembiayaan yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya tanpa memandang evaluasi dari dampak pembiayaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengeluaran

ini akan memicu inflasi dikala peningkata sumber pembiayaan karena peningkatan alokasi dana dapat memicu dampak peningkatan perputaran uang dimasyarakat dan membawa kecenderungan peningkatan harga barang dan konsumsi masyarakat. Namun, dapat disadari bahwa pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun karena melihat dampak kondisi negara dan keadaan penduduknya (pada negara berkembang) karena disatu sisi pemerintah juga menjalankan fungsi sebagai *agent of development* dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara.

Tiga faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah, yakni : 1). Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan; 2) Peningkatan penyediaan (*supply*) layanan pemerintah dari para penerima layanan; dan 3). Meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga golongan utama, yakni: 1). Pengeluaran pemerintah untuk membiayai barang dan jasa; 2).Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; 3) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga/pinjaman. (Boediono,1999). Berdasarkan penelitian Rahmawati (2011) menyatakan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hasil serupa didapatkan oleh Nguyen (2003) yang menyatakan tingginya pengeluaran konsumsi pemerintah dapat meningkatkan inflasi. Hasil berbeda didapatkan oleh penelitian Joe *et all.*, (2021) yang menyatakan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi.

Salah satu yang dapat dilakukan dengan mengontrol laju inflasi yaitu tidak terlepas dari adanya kebijakan pengaruh tingkat suku bunga dan kontrol jumlah uang beredar yang dapat dilakukan oleh otoritas bang sentral sebagai garda utama dalam penanganan kebijakan moneter, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan yaitu menekan jumlah uang beredar serta mengatur tingkat suku bunga yang akan memberikan pengaruh langsung terhadap kontrol inflasi.

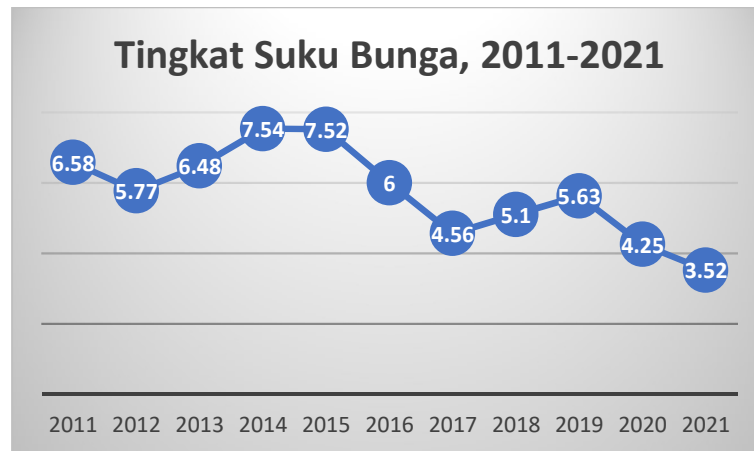
Tingkat suku bunga merupakan salah satu komponen yang perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi tingkat inflasi (Santoso, 2010; Sinambela, 2011; dan Adrian dan Zulfahmi, 2012. Menurut Nopirin (2000) mendefinisikan suku bunga adalah besaran biaya yang

dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi *money supply*, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor riil (Atmadja, 1999). Adanya kontrol melalui tingkat suku bunga dapat mempengaruhi dua komponen yang sangat berarti yaitu peningkatan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral akan berdampak terhadap penurunan jumlah uang yang beredar dan hal ini akan mendominasi masyarakat untuk dapat menabung, sehingga hal itu akan mampu mempengaruhi kemampuan kontrol daya beli masyarakat, selain itu peningkatan suku bunga itu disatu sisi akan menurunkan adanya investasi karena sebagai dampak peningkatan suku bunga dari pembiayaan investasi riil yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian Beureukat (2022) menyatakan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Penelitian Silaban dkk., (2021) menyatakan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian Amhimmid (2021) menyatakan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

Apabila melihat trend kenaikan tingkat suku bunga oleh bank sentral dapat diamati pada data diketahui bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia selaku bank sentral yaitu berfluktuasi dari tahun 2011 hingga 2021, terdapat peningkatan tingkat suku bunga ditahun 2013 sampai ditahun 2015 hal tersebut karena indikasi terjadinya peningkatan inflasi sehingga bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tingkat suku bunga ini agar inflasi dapat tetap terjaga dan kondisi ekonomi dapat tetap stabil, namun apabila dilihat dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung stabil dan ditahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan karena efek terjadinya pelemahan ekonomi dan tingkat inflasi yang rendah karena dampak pandemic covid-19, sehingga bank Indonesia merangsang tingkat suku bunga yang rendah agar dapat menggeliatkan perekonomian yang ada melalui penyaluran kredit agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dan tumbuh kearah yang lebih baik.

**Gambar 4. Tingkat Suku Bunga Indonesia Tahun 2011-2021**





Sumber: Bank Indonesia, 2022

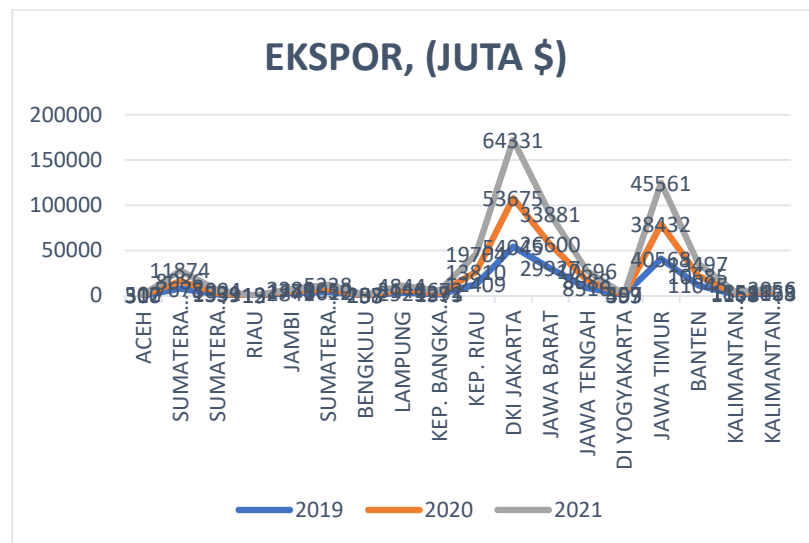
Faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi yaitu ekspor. Ekspor ditentukan oleh beberapa faktor yang akan menentukan kemampuan negara pengeksport. Menurut Sukirno (2004) beberapa faktor tersebut antara lain adalah daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar, dan kurs valuta asing. Dari sisi daya saing produk ekspor Indonesia akan terjadi penurunan apabila peningkatan harga dari produk yang melebihi import dari negara lain akan berdampak pada penurunan daya saing produk sehingga hal ini akan menurunkan ketertarikan negara lain terhadap produk Indonesia karena dianggap lebih mahal dibandingkan pesaing dari negara lainnya. Ekspor produk juga sangat berpengaruh terhadap kondisi dari negara-negara lainnya, apabila negara pengimport memiliki kondisi perekonomian yang baik akan berdampak bagi semakin besarnya negara Indonesia berpeluang melakukan ekspor ke negara tersebut, selain itu kondisi perekonomian terkait keadaan inflasi dan juga resesi negara lain akan berpengaruh dalam peningkatan transaksi ekspor terhadap barang-barang atau produk ekspor ke negara lain.

Proteksi dari negara luar terhadap produk eksport Indonesia akan sangat berdampak bagi kelangsungan ekspor yang dilakukan, proteksi yang lebih melarang import akan berdampak bagi penurunan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke negara lain, sehingga hal tersebut yang dapat mengakibatkan peningkatan harga barang domestik karena produk import yang masuk kewilayah Indonesia telah dibatasi oleh pemerintah dan lebih dominan menggunakan produk domestic, begitu sebaliknya apabila diterapkan oleh negara lain. Terkait kurs valuta asing juga akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekspor ke negara

lain karena penyesuaian terhadap nilai tukar mata uang asing yang pengaruhnya terhadap peningkatan harga produk ekspor dan kondisi nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain. Penelitian Jumhur dkk., (2018) menyatakan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian Ulfa dkk., (2018) menyatakan ekspor tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Kondisi ekspor di wilayah Indonesia bagian barat juga cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2021 hal tersebut juga disebabkan karena gejolak perekonomian yang masih kurang stabil dari sisi ekonomi karena dampak pandemi sehingga hal tersebut yang mengakibatkan banyak produsen atau pelaku usaha kurang dapat mengoptimalkan produksi karena terkendala dari kebijakan aturan pembatasan penanganan covid ini, namun apabila dicermati dapat diketahui bahwa kondisi ekspor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi import yang dilakukan, hal ini berarti bahwa ketahanan ekonomi terhadap nilai jual produk Indonesia masih tergolong diminati dan tinggi oleh negara lain, sehingga hal ini yang menjadikan daya saing bagi Kawasan industri Indonesia di wilayah bagian barat untuk dapat tetap mengoptimalkan aktivitas produksi dan peluang ekonomi lainnya ununtuk dapat tetap bersaing secara global dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke negara lainnya.

**Gambar 5. Ekspor Indonesia Bagian Barat Tahun 2019-2021**



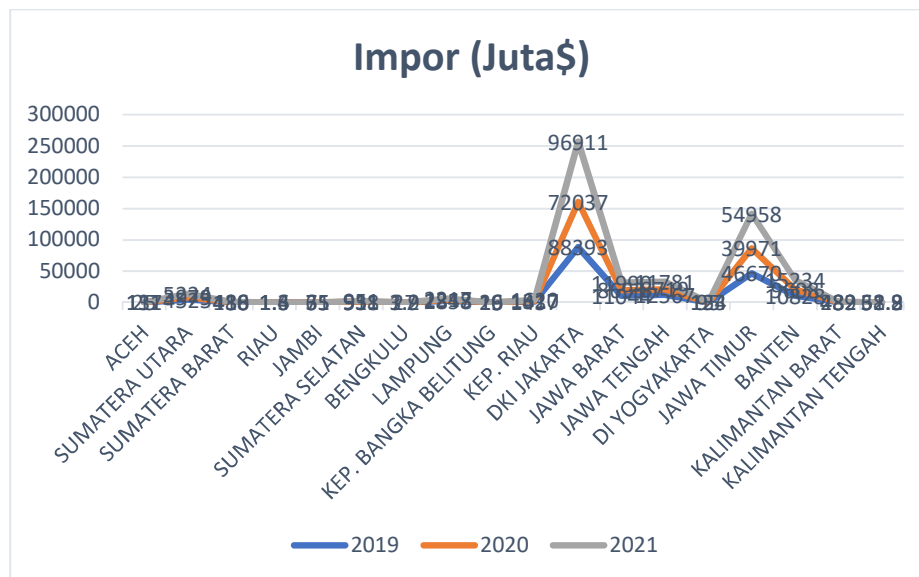
Sumber: BPS Indonesia, 2022

Inflasi di Indonesia juga dapat dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan pengaruh adanya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasi nilai tukar

rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka langkah yang dapat dilakukan adalah penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika. Ketidakstabilan nilai tukar ini akan mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang juga melakukan import bahan baku industri mengalami dampak dan ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari rnelonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. Dengan terdepresiasinya rupiah terhadap mata uang negara lain menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri. Dengan adanya lonjakan-lonjakan drastis pada tingkat kurs dapat membuat para produsen atau pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan barang modal yang mempunyai unsur impor yang tinggi sehingga kemudian akan berdampak pada naiknya biaya untuk mengimpor barang untuk keperluan proses produksi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat harga domestik yang merupakan cerminan dari tingkat inflasi. Penelitian Jumhur dkk., (2018) menyatakan impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian Ulfa dkk., (2018) menyatakan impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

Tingkat import di wilayah Indonesia bagian barat yang cenderung sebagai pusat aglomerasi industry justru akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan biaya produk import dari bahan baku usaha yang akan diperlukan. Adanya kenaikan import ini akan berdampak terhadap peningkatan harga produk yang akan mengganggu kestabilan harga pasar dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadi kenaikan harga/inflasi.

**Gambar 6. Impor Indonesia Bagian Barat Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS Indonesia, 2022

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa impor untuk wilayah Indonesia bagian barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2021, namun disatu sisi telah mengalami peningkatan kembali ditahun 2021 karena faktor aktivitas produksi yang mulai berjalan secara perlahan dalam pemenuhan aktivitas produksi sektor usaha yang ada. Terdapat beberapa daerah yang memang memiliki aktivitas impor yang tinggi seperti daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur, hal tersebut dikarenakan bahwa daerah ini merupakan wilayah aglomerasi industri dengan tingkat kepadatan aktivitas usaha, industri dan penduduknya, sehingga hal ini terjadi karena wilayah tersebut besar aktivitasnya dalam pemenuhan faktor produksi serta pemenuhan kebutuhan akan penduduk, sehingga import dilakukan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga, ekspor dan impor terhadap inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Tabel 2 Hasil Regresi

---

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

VARIABLES	Ols	Random	Fixed
InImpor	-0.0453 (0.133)	-0.00258 (0.0872)	-0.000320 (0.0861)
InEkspor	0.102 (0.149)	0.0143 (0.0976)	0.00972 (0.0963)
SukuBungaBI	1.099*** (0.123)	1.091*** (0.351)	
InPengeluaran	-0.470* (0.243)	-0.432*** (0.159)	-0.430*** (0.157)
o.SukuBungaBI			-
Constant	4.998 (4.167)	4.806 (3.387)	11.04*** (2.580)
Observations	198	198	198
R-squared	0.326	0.324	0.079
Number of Tahun		11	11

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan output di atas, dilihat dari nilai uji t *random effect model* adalah pendekatan yang sesuai dibandingkan dengan *fixed effect model*. Signifikansi variabel diketahui dengan membandingkan antara nilai t-statistik yang diperoleh dengan nilai t-tabel. *Degree of freedom* sebesar 193, maka nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 5% adalah 1,97. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini yaitu:

Nilai koefisien pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -0,432 dengan thitung sebesar 2,716 > t tabel 1,97, hal ini berarti pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Nilai koefisien tingkat suku bunga sebesar 1,091 dengan thitung sebesar 3,108 > t tabel 1,97, hal ini berarti tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Nilai koefisien ekspor sebesar 0,014 dengan thitung sebesar 0,144 < t tabel 1,97, hal ini berarti ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Nilai koefisien impor sebesar -0,002 dengan thitung sebesar 0,022 < t tabel 1,97, hal ini berarti impor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Nilai *R-squared* sebesar 0,324, maka dapat disimpulkan variasi tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat 32,4 persen dijelaskan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah, tingkat suku bunga, ekspor dan impor, sisanya 67,6 dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil analisis pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1 persen maka akan mengakibatkan turunnya tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat sebesar 0,432 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin setiap tahun yang dianggarkan baik untuk pembiayaan keperluan negara dan juga fasilitas sarana dan prasarana publik untuk kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap inflasi yang ada. Ketika memang anggaran pengeluaran pemerintah yang dilakukan dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal tersebut telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian wilayah, ketika anggaran pengeluaran meningkat yang melihat kondisi inflasi melemah, dapat saja anggaran tersebut difokuskan untuk kebijakan yang ekspansif dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produktif sektor usaha untuk sama-sama membangkitkan perekonomian wilayah agar dapat menggeliat dan produktif.

Disatu sisi ketika tingkat inflasi yang tinggi karena efek tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat dan berdampak terhadap peningkatan harga-harga barang secara umum dan terus menerus maka disini kebijakan kontraktif dapat dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat menekan anggaran yang dikeluarkan untuk dapat mendukung pemulihan ekonomi dari inflasi yang tinggi sehingga stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga dan tumbuh diarah yang positif. Pengeluaran pemerintah ini akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian wilayah, khususnya menyesuaikan dengan laju inflasi yang ada, suatu negara akan berfikir optimis dalam memperoleh tingkat inflasi yang stabil dan tetap terjaga, karena hal tersebut

dilakukan untuk dapat menjaga keberlangsungan pengeluaran pemerintah, menjaga daya beli masyarakat dan tetap menjaga perekonomian dapat tetap stabil.

Apabila melihat fenomena di wilayah Indonesia bagian barat dapat kita ketahui bahwa proporsi pengeluaran pemerintah akan meningkat setiap tahunnya, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat kepadatan penduduk yaitu pulau Jawa yang hampir menguasai 56 persen tingkat kepadatan wilayah yang ada di Indonesia, dapat diketahui bahwa ketika wilayah tersebut padat akan jumlah dan aktivitas penduduk maka wilayah tersebut perlunya dukungan dari segala lini sektor akses pendukungnya, seperti Pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga tingkat pengeluaran pemerintah di wilayah bagian barat Indonesia ini cenderung akan lebih besar dan meningkat untuk mendukung pembangunan wilayah dan juga penduduknya, sehingga dalam hal ini pengeluaran pemerintah ini akan bekerja secara ekstra dalam menjaga kestabilan perekonomian agar dapat tetap menjaga tingkat inflasi di wilayah aglomerasi ini serta memberikan kestabilan harga terhadap wilayah lainnya baik tengah dan juga timur Indonesia.

## **2. Pengaruh suku bunga terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil analisis suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat sebesar 1,091 persen. Kebijakan moneter merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga inflasi melalui mekanisme penyesuaian tingkat suku bunga dan juga jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan kontraktif peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh bank Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi, hal ini berarti bahwa ketika tingkat suku bunga meningkat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat saving yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi tingkat daya beli/konsumsi yang dilakukan, namun sebaliknya kecenderungan konsumsi yang dilakukan sehingga menyebabkan peningkatan daya beli yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak pula terhadap kenaikan laju inflasi.

Sebagai wilayah aglomerasi di Indonesia, Kawasan Indonesia bagian barat ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan akan aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, sosial, lengkapnya sarana dan prasarana pendukung, serta banyaknya sub sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam hal ini peningkatan tingkat suku bunga malah akan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi melalui peminjaman kredit, hal tersebut sering dilakukan bahwa penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat diwilayah Indonesia bagian barat akan lebih besar dikeluarkan setiap harinya dan menyesuaikan indeks kemahalan harga wilayah, sehingga kenaikan laju inflasi yang tinggi ini yang berdampak pada peningkatan harga barang, cenderung juga akan meningkatkan konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pengaruhnya bahwa ketika jumlah pendapatan yang tidak sebanding dimiliki masyarakat maka keinginan untuk mendorong peminjaman kredit akan terus meningkat tanpa memperhatikan keberadaan tingkat suku bunga yang ditargetkan oleh bank Indonesia namun konsumsi dan aktivitas produksi tetap berjalan dalam pemenuhan kebutuhan hidup penduduk diwilayah tersebut.

### **3. Pengaruh ekspor terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil analisis ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan ekspor sebesar 1 persen maka tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat akan cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,014 persen di Wilayah Indonesia Bagian Barat, namun pengaruh ini tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa ketika aktivitas ekspor yang dilakukan ke negara lainnya mengalami peningkatan maka dapat pula mempengaruhi terhadap peningkatan terhadap inflasi namun tidak begitu signifikan. Ketika aktivitas ekspor yang terus mengalami peningkatan ini berarti bahwa adanya peningkatan konsentrasi terhadap produk-produk yang akan di ekspor, sehingga dari sisi penawaran terhadap produk tersebut akan menjadi semakin tinggi dan diminati oleh negara lain. Dampak yang dapat ditimbulkan dari peningkatan ekspor terhadap kemampuan domestic yaitu akan terjadi pemenuhan kebutuhan bahan baku yang cenderung tinggi dan mengakibatkan peningkatan pembelian bahan baku dan merangsang peningkatan harga tersebut, kedua harga barang-barang di dalam negeri akan menjadi semakin mahal karena terjadi peningkatan harga-harga barang domestik, sehingga solusi yang dapat



dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapinya yaitu dengan adanya konsumsi terhadap barang-barang ekspor untuk menyeimbangkan tingkat konsumsi dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Peningkatan ekspor di wilayah Indonesia bagian barat merupakan suatu bentuk aktivitas yang wajar, karena wilayah ini merupakan pusat aglomerasi di Indonesia, dimana wilayah ini banyak terdapat aktivitas industri atau usaha yang menghasilkan produk-produk untuk di ekspor ke luar negeri, sehingga penawaran akan ekspor menjadi tinggi, serta pemenuhan kebutuhan akan bahan baku produksi akan mengalami peningkatan, selain itu wilayah Indonesia bagian barat ini juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga segala aktivitas konsumsi juga akan berpengaruh yang dapat pula memberikan sumbangan inflasi apabila terjadi peningkatan konsumsi produk domestik serta diiringi dengan peningkatan ekspor apabila kurang adanya kontrol terhadap aktivitas ekonomi tersebut.

#### **4. Pengaruh impor terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil analisis impor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan impor sebesar 1 persen maka tingkat inflasi di Wilayah Indonesia Bagian Barat akan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,002 persen di Wilayah Indonesia Bagian Barat, namun pengaruh ini tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa aktivitas terhadap impor merupakan suatu bentuk kontrol yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensubstitusi atau mengkomplementerkan terhadap produk-produk atau keperluan yang dirasakan kurang secara domestik dan perlunya dukungan dari produk impor. Sehingga ketika kuota impor turun maka akan berdampak terhadap menurunnya tingkat inflasi secara signifikan, hal tersebut juga disebabkan karena ketergantungan akan produk impor dinilai kurang mensinergi dalam mendukung perekonomian wilayah, karena aktivitas ini akan dapat menambah beban pengeluaran pemerintah, mengurangi stok cadangan devisa, serta membuat instabilitas dalam neraca perdagangan Indonesia.

Aktivitas impor pada dasarnya akan sangat berpengaruh dalam menyumbang inflasi, ketika produk impor yang berlimpah dan bersaing memasuki pangsa pasar Indonesia, maka peminat akan produk impor ini tinggi, sehingga hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya

peningkatan daya beli/konsumsi masyarakat sehingga cenderung akan berdampak inflasi ketika telah ketergantungan dengan produk impor yang diiringi dengan peningkatan harga-harga, hal ini juga akan cenderung dapat melemahkan daya saing produk domestik, sehingga perlu penstabilan akan pemenuhan kebutuhan produk impor supaya tidak mengganggu akan aktivitas lokal wilayah yang nantinya berujung pada peningkatan inflasi.

Wilayah Indonesia bagian barat yang terkenal akan kepadatan penduduk dan aktivitas usahanya tidak akan dapat terlepas dari yang namanya aktivitas impor, kemampuan impor ini juga menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku usaha, serta pemenuhan kebutuhan produk-produk luar negeri yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ketika masyarakat diwilayah ini mampu menstabilkan kemampuan konsumsi dan produksi dengan produk lokal wilayah maka kestabilan ekonomi dapat tetap terjaga dengan baik, namun apabila tingginya peminatan terhadap produk impor hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan inflasi, begitujuga sebaliknya ketika produk impor sebagai substitusi yang masuk ke wilayah ini rendah, maka akan berdampak pada rendahnya inflasi karena kuatnya dukungan dari produk domestik.

## REFERENSI

- Beureukat.2022. Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, Vol. 18, No.1.
- Fadilla, Amir Salim., dan Purnamasari, Anggun. 2021. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.7, No. 1.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2016. *Perkembangan Inflasi Dan Peran Pemerintah Daerah*. Artikel.
- Joy, Jideofor Nnennaya., Okafor, Michah Chukwuemeka., dab Abaa, Eke Onyekachi. 2021. Impact of Public Capital Expenditure on Inflation Rate in Nigeria. *Journal La Bisecoman*.
- Nguyen, Tai Dang. 2003. Impact of government spending on inflation in Asian emerging economies: evidence from India, Vietnam, and Indonesia.
- Nur, Triasesiarta., dan Alfo Muhammad. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2005-2014 (Pendekatan Error Correction Model). *ESENSI*, Vol.18, No.2.
- Panjaitan, Meita Nova Yanti., dan Wardoyo. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.21, No.3*.

- Rahmawati. 2011. Pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan suku bunga terhadap tingkat inflasi di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol.9.
- Rulyusa., dan Ikhsan, Mohamad. 2016. Inflasi Makanan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia Food Inflation and Monetary Policy Implication in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.17, No.1.
- Santoso, Wijoyo., dkk. 2013. *Pengaruh Hari Besar Pada Komoditas Utama Inflasi di Indonesia*. Working Paper.
- Sayekti, Nidya Waras. 2022. Lonjakan Inflasi Tahun 2022 Dan Upaya Mengatasinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol.14, No.8.
- Setiawan, Adi. 2014. Karakteristik Inflasi Kota-Kota di Indonesia Bagian Barat. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW Salatiga*, Vol.5, No.1.
- Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). 2020. *Inflasi IHK 2020 Tercatat Rendah*. Artikel.